

Joshua Dean Eukharisti
Prabowo¹
Muhammad Faiz Dwi Sakti²
Rafarza Muhammadi³
Sahrul Romdoni⁴
Muhammad Mifzal
Sumarsono⁵
Neneng Yani Yuningsih⁶

EVALUASI SISTEM AKUNTANSI DAN KETERBUKAAN INFORMASI KEUANGAN DESA: STUDI KASUS DESA SUKADANA, CIMANGGUNG, SUMEDANG

Abstrak

Penelitian ini mengevaluasi implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dan mekanisme keterbukaan informasi keuangan di Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Sejak penerapan SISKEUDES pada 2017, Desa Sukadana menerapkan pencatatan ganda manual dan digital yang memunculkan ketidaksinkronan data antar sistem. Selain itu, publikasi dokumen keuangan melalui papan informasi desa, baliho, situs web, dan media sosial belum sepenuhnya menjangkau warga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara semi-terstruktur, observasi dokumentasi APBDes, serta kuesioner literasi digital masyarakat. Analisis data dilakukan melalui triangulasi antara catatan SISKEUDES, buku manual, dan hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Konsistensi dan akurasi pencatatan di SISKEUDES masih terhambat oleh update kebijakan otomatis tanpa sinkronisasi dengan buku manual; (2) Keterbukaan informasi anggaran relatif memadai pada saluran fisik, namun efektivitas saluran digital terbatasi oleh rendahnya literasi gadget warga; (3) Kendala teknis alat desa terbesar terletak pada kurangnya pelatihan modul perencanaan dan pelaporan dalam SISKEUDES; (4) Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) terbukti penting dalam pendampingan door-to-door, namun cakupannya masih terbatas pada wilayah inti desa. Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan peningkatan prosedur validasi data ganda, penyusunan SOP sinkronisasi manual digital, pelatihan berbasis modul kritis SISKEUDES, serta pengembangan strategi literasi digital terpadu melalui LKD. Implementasi rekomendasi ini diharapkan memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Desa Sukadana.

Kata Kunci: SISKEUDES; akuntabilitas keuangan desa; keterbukaan informasi; Lembaga Kemasyarakatan Desa; Desa Sukadana.

Abstract

This study evaluates the implementation of the Village Financial Management System (SISKEUDES) and the mechanisms for financial information disclosure in Sukadana Village, Cimanggung District, Sumedang Regency. Since its adoption in 2017, Sukadana Village has maintained dual bookkeeping—both manual and digital—resulting in persistent data inconsistencies between physical ledger entries and the centrally managed SISKEUDES platform. Financial documents such as the Village Budget (APBDes), Budget Realization Reports, and Change of Component Unit are published via village notice boards, banners, the official website, and social media; however, digital adoption remains uneven due to limited technical training for staff and low gadget literacy among residents. Employing a qualitative-descriptive approach, data were collected through semi-structured interviews, documentation review of APBDes, and a community digital literacy questionnaire. Data analysis was conducted by triangulating SISKEUDES records, manual ledgers, and interview

^{1,2,3,4,5}Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran
email: joshua23001@mail.unpad.ac.id, muhammad23162@mail.unpad.ac.id,
rafarza23001.mail.unpad.ac.id, muhammad23202.mail.unpad.ac.id, neneng.yani@unpad.ac.id

transcripts. The findings reveal: (1) consistency and accuracy in SISKEUDES entries are hindered by automatic policy updates without real-time synchronization with manual records; (2) physical disclosure channels are adequate, but digital channels are underutilized due to residents' limited device proficiency; (3) the primary technical challenge for village officials lies in insufficient training on SISKEUDES modules for planning and reporting; and (4) the Village Community Institution (LKD) plays a critical role in door-to-door financial guidance, though its coverage is confined to the village core area. Based on these results, the study recommends improving dual-entry data validation procedures, establishing standard operating procedures for manual–digital synchronization, delivering targeted SISKEUDES module training, and developing an integrated digital literacy strategy through the LKD. Implementing these recommendations is expected to strengthen accountability and transparency in Sukadana Village's financial management.

Keywords: SISKEUDES; village financial accountability; information disclosure; Village Community Institution; Sukadana Village.

PENDAHULUAN

Sejak tahun 2017, Pemerintah Desa Sukadana telah menerapkan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sebagai alat bantu utama dalam mengelola siklus penganggaran, mulai dari tahap perencanaan, pencatatan, hingga pelaporan keuangan. Meski sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas, dalam praktiknya masih terjadi pencatatan ganda yakni melalui buku manual dan sistem digital yang sering menimbulkan ketidaksesuaian data antara keduanya. Ketidaksinkronan ini diperparah oleh sifat SISKEUDES yang merupakan aplikasi terpusat dan dikendalikan langsung oleh pemerintah pusat, di mana perubahan kebijakan makro seperti penyesuaian tarif pajak atau aturan teknis dapat secara otomatis mengubah data tanpa sinkronisasi real-time dengan catatan manual desa. Hal ini berdampak pada keakuratan laporan yang dipegang desa, bahkan hingga proses pelaporan dan pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam rangka transparansi, dokumen-dokumen penting seperti APBDes, Laporan Realisasi Anggaran, dan perubahan komponen kegiatan telah dipublikasikan melalui saluran fisik (papan informasi dan baliho) maupun digital (situs web dan media sosial). Namun, adopsi teknologi ini belum sepenuhnya merata: beberapa aparat desa masih memerlukan pelatihan tambahan untuk mengoperasikan sistem, sementara rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat membatasi akses mereka terhadap informasi tersebut. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah desa membentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang bertugas mendampingi warga secara langsung dalam memahami laporan keuangan. Meski demikian, hingga kini belum pernah dilakukan evaluasi sistematis terhadap efektivitas implementasi SISKEUDES maupun terhadap saluran keterbukaan informasi yang ada. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi secara mendalam konsistensi dan akurasi pencatatan keuangan desa, efektivitas mekanisme keterbukaan informasi publik, kendala teknis yang dihadapi aparat desa dalam pengoperasian sistem, serta peran LKD dalam meningkatkan aksesibilitas dan pemahaman masyarakat terhadap laporan keuangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan literatur pemerintahan desa, serta rekomendasi praktis bagi peningkatan tata kelola keuangan desa yang lebih akuntabel, transparan, dan inklusif.

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus yang secara khusus berfokus pada pengelolaan keuangan Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung. Pendekatan kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk menggali dan memaparkan praktik serta tantangan yang dihadapi aparat desa dalam pelaksanaan SISKEUDES dan proses penyusunan APBDes tanpa melakukan intervensi variabel. Desain studi kasus dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai dinamika dan konteks lokal Desa Sukadana, yang menunjukkan karakteristik semi-perkotaan dengan tingkat partisipasi masyarakat dan inovasi penggunaan sistem informasi yang relatif tinggi.

Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Informan

Populasi penelitian mencakup seluruh pihak yang terlibat dalam mekanisme pengelolaan keuangan Desa Sukadana, mulai dari perangkat desa (Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga tokoh masyarakat dan warga yang aktif pada musyawarah desa. Teknik purposive sampling diterapkan untuk memilih sampel informan yang memiliki peran strategis dan representatif, yaitu perangkat desa inti, pengurus BPD, ketua RT/RW, serta perwakilan warga penerima manfaat program. Pengambilan informan dilakukan secara berkelanjutan hingga tercapai titik data saturation, yaitu saat tambahan wawancara tidak lagi menambah informasi baru.

Variabel dan Definisi Operasional

Penelitian ini mengukur beberapa variabel utama, antara lain kapasitas SDM aparatur desa, transparansi penyusunan APBDes, tingkat partisipasi masyarakat, ketepatan dan kecepatan pencairan dana, dokumentasi dan pembukuan keuangan, mekanisme pengawasan, dan dampak program terhadap kesejahteraan masyarakat. Setiap variabel didefinisikan secara operasional, misalnya kapasitas SDM aparatur diukur berdasarkan frekuensi pelatihan dan hasil wawancara, sedangkan transparansi diukur melalui keberadaan baliho publikasi, akses portal desa, dan dokumentasi notulen Musdes. Ketepatan pencairan dana dianalisis melalui perbandingan waktu rata-rata antara pengajuan SPP dan realisasi pencairan, sedangkan konsistensi pembukuan diukur dari selisih saldo bulanan antara catatan SISKEUDES dan buku manual.

Instrumen Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan beberapa instrumen, yaitu pedoman wawancara semi-terstruktur, lembar observasi, dan formulir dokumentasi. Pedoman wawancara dirancang untuk mengeksplorasi proses perencanaan anggaran, alur pencairan dana, mekanisme publikasi informasi, serta evaluasi program. Lembar observasi digunakan untuk mencatat kehadiran peserta Musdes, tata kelola publikasi, dan praktik transparansi lainnya di lapangan. Formulir dokumentasi memfasilitasi pengumpulan dokumen resmi, seperti APBDes, RPJMDes, LKPJ, notulen musyawarah desa, dan print-out data SISKEUDES.

- Wawancara Semi-terstruktur Wawancara semi-terstruktur dilakukan secara tatap muka dengan setiap informan, direkam menggunakan alat perekam audio, dan dilengkapi dengan catatan lapangan. Pertanyaan berfokus pada pengalaman dan persepsi informan terkait penggunaan SISKEUDES, tantangan teknis, serta aspek transparansi dan akuntabilitas. Hasil rekaman kemudian ditranskripsi secara verbatim untuk menjaga akurasi kutipan dan konteks.
- Prosedur Pengumpulan dan Validasi Data Proses penelitian dimulai dengan tahap persiapan, yaitu pengurusan izin penelitian, penjadwalan wawancara, dan uji coba pedoman wawancara. Selanjutnya, tahap pengumpulan data meliputi pelaksanaan wawancara, observasi langsung saat Musdes/Musdus, dan pengumpulan dokumen keuangan desa. Untuk menjamin validitas dan keandalan data, dilakukan triangulasi metode (wawancara, observasi, dokumentasi), triangulasi sumber data (SISKEUDES, buku manual, hasil wawancara), serta member checking dengan mengkonfirmasi kembali ringkasan temuan kepada beberapa informan kunci.

Teknik Analisis Data

Analisis data mengikuti model Miles & Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data mencakup proses pemilihan dan penyederhanaan data mentah menjadi unit analisis, seperti kode dan tema. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel kategorisasi, dan kutipan ilustratif untuk memperjelas temuan. Penarikan kesimpulan dan verifikasi melibatkan cross-check antar hasil analisis dan diskusi lanjutan dengan informan.

- Analisis Deskriptif untuk Konsistensi Pencatatan Analisis deskriptif digunakan untuk menghitung dan membandingkan saldo bulanan yang dicatat dalam SISKEUDES dan buku kas manual. Perbandingan ini menyajikan ringkasan selisih saldo dan frekuensi koreksi sebagai indikator konsistensi pembukuan.
- Analisis Konten untuk Mekanisme Keterbukaan Informasi Analisis konten diterapkan pada dokumen publikasi, seperti baliho, portal desa, dan notulen musyawarah, untuk mengidentifikasi tema-tema transparansi. Aspek yang dianalisis meliputi frekuensi publikasi, format penyajian, dan saluran informasi.

- Triangulasi Data antara SISKEUDES, Buku Manual, dan Wawancara Triangulasi data mengintegrasikan hasil analisis SISKEUDES, buku manual, dan narasi wawancara guna memastikan validitas temuan. Proses ini menyoroti kesesuaian dan perbedaan antara sumber serta mendalami faktor penyebabnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian menunjukkan bahwa Desa Sukadana telah menerapkan sistem pencatatan keuangan desa yang rapi dan berlapis. Pencatatan keuangan desa dilakukan melalui buku kas desa dan aplikasi SISKEUDES, yang memang dirancang untuk meningkatkan akurasi dan transparansi. Setiap minggu, Sekretaris dan Bendahara Desa meninjau Buku Kas Umum dan Buku Penerimaan untuk memastikan setiap kuitansi dan nota terinput dengan lengkap sebelum data keuangan diunggah ke SISKEUDES oleh BPD. Selanjutnya, audit internal rutin setiap tiga bulan oleh BPD tidak hanya mencocokkan angka dalam laporan SISKEUDES, tetapi juga memverifikasi kesesuaian kegiatan dengan rencana desa. Praktik ini sejalan dengan prinsip public financial management yang menekankan credible budget dan pengendalian internal kuat (internal control) untuk menjamin data keuangan valid bagi pengambilan keputusan.

Hasilnya, akurasi catatan keuangan Sukadana relatif tinggi. Proses verifikasi berlapis menunjukkan komitmen pada konsistensi data. Temuan ini sejalan dengan studi Sapril dkk. (2023) di Desa Jenetallasa (Sulawesi Selatan), yang menyatakan penerapan SISKEUDES secara menyeluruh terbukti meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan desa. Dengan demikian, meskipun penelitian lain menemukan adanya kesulitan teknis seperti laporan belum terekam karena error, di Sukadana kendala tersebut tampaknya telah diminimalkan melalui latihan dan koordinasi tim keuangan desa sejak tahun 2017. Kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang dibangun lewat pelatihan berkelanjutan mendukung terwujudnya pencatatan yang lebih handal.

Analisis Mekanisme Keterbukaan Informasi Anggaran

Desa Sukadana menerapkan mekanisme keterbukaan informasi anggaran yang komprehensif. Pemerintah desa mempublikasikan laporan realisasi APBDes dan capaian kegiatan melalui berbagai saluran publik: media sosial (Instagram, Facebook), situs web desa, serta spanduk di balai desa dan tempat umum. Selain itu, warga yang kurang melek teknologi diakomodasi dengan penjelasan langsung oleh RT/RW atau forum warga yang difasilitasi kader desa. Di awal dan akhir tahun anggaran, pemerintah desa mengadakan forum terbuka (musyawarah desa) untuk menyampaikan capaian pembangunan dan laporan keuangan secara tatap muka sehingga masyarakat dapat mengakses data dan memberi masukan secara real time.

Pendekatan multi-saluran ini sesuai dengan prinsip transparansi publik: dokumen perencanaan, penganggaran, realisasi, dan pelaporan idealnya dipublikasikan melalui media yang mudah diakses masyarakat, misalnya papan informasi desa atau aplikasi SISKEUDES. Dengan membuka akses informasi sejak dulu, proses perencanaan dan pelaporan menjadi lebih akuntabel serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Temuan lapangan di Sukadana menunjukkan bahwa penjelasan publik secara rutin dan penggunaan media digital telah memperkuat akuntabilitas anggaran. Hal ini selaras dengan prinsip good governance, di mana keterbukaan informasi publik menjadi kunci terciptanya iklim kepercayaan antara pemerintah desa dan warga.

Kendala Teknis dalam Penggunaan SISKEUDES oleh Aparat Desa

Meskipun SISKEUDES telah diadopsi, aparatur desa menghadapi kendala teknis tertentu. Hasil wawancara mengungkap mayoritas warga desa — dan sebagian aparatur desa — kurang optimal dalam penggunaan gawai dan akses internet masih belum merata di wilayah semi-perkotaan Sukadana. Kendala konektivitas internet dan kerap terjadi gangguan listrik dapat memperlambat proses input data dalam aplikasi SISKEUDES. Selain itu, temuan dari studi lain menunjukkan kerapnya error aplikasi sebagai hambatan penggunaan SISKEUDES (misalnya laporan yang belum sempat diinput karena error sistem).

Untuk mengatasi itu, Desa Sukadana rutin mengadakan pelatihan teknis penggunaan SISKEUDES sejak 2017 dan membangun koordinasi intensif antar-staf desa. Meski begitu, kekurangan keterampilan digital masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, solusi kreatif diimplementasikan, yaitu melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan kader desa untuk mendampingi warga dalam memahami informasi keuangan secara non-digital. Secara

umum, temuan ini menunjukkan bahwa kendala teknis seperti infrastruktur TI dan kapasitas SDM dapat mengganggu pelaksanaan SISKEUDES — sesuai dengan temuan penelitian lain di Indonesia — namun di Sukadana upaya mitigasi seperti pelatihan dan kolaborasi antarpihak telah membantu menguranginya.

Aksesibilitas Laporan Keuangan bagi Masyarakat dan Peran LKD

Penelitian menegaskan aksesibilitas informasi keuangan bagi warga yang tinggi. Selain pengumuman digital, masyarakat dapat langsung mengunjungi kantor desa untuk melihat informasi keuangan tahunan. Desa juga aktif menyelenggarakan sosialisasi terbuka: misalnya, forum musyawarah yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perwakilan warga mengupas capaian program serta detail laporan keuangan. Strategi komunikasi dua arah ini memastikan warga dari berbagai usia dan latar belakang dapat memperoleh data anggaran.

Peran LKD sangat vital dalam konteks ini. Mengantisipasi keterbatasan literasi teknologi, Kepala Keuangan Desa menugaskan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa (LKD) untuk mengunjungi rumah-rumah warga dalam rangka edukasi door-to-door tentang anggaran desa. Upaya ini dinilai efektif oleh warga, karena mampu menjawab keraguan mereka secara personal dan praktis. Pendekatan berbasis LKD ini menunjukkan betapa keterbukaan keuangan desa bukan hanya soal ketersediaan dokumen, tetapi juga kemudahan pemahaman masyarakat. Secara umum, mekanisme Sukadana telah menciptakan berbagai saluran informasi (media sosial, papan informasi, forum publik, pendampingan LKD) sehingga laporan keuangan desa benar-benar dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Implikasi Temuan terhadap Akuntabilitas dan Transparansi

Temuan lapangan Desa Sukadana memperlihatkan bahwa akuntabilitas anggaran bukan sekadar jargon, melainkan praktik yang dijuluki oleh transparansi dan partisipasi. Mekanisme berjenjang (Musdus–Musdes), keterlibatan LKD, dan pengawasan berlapis oleh BPD serta aparat inspektorat mempertegas hal ini. Dengan komunitas sebagai prinsipal yang aktif terlibat (berdasarkan Teori Agency), penggunaan dana desa diawasi secara langsung oleh warga. Kegiatan audit internal dan eksternal rutin turut memastikan bahwa setiap rupiah dikelola sesuai peruntukan. Hasilnya, kepercayaan publik terhadap pemerintah desa meningkat—sesuai prinsip good governance bahwa transparansi publik membangun trust antarlembaga.

Secara konseptual, kombinasi SISKEUDES dan kontrol internal yang kuat secara nyata mencegah potensi penyalahgunaan. Studi Usman & Sundari (2024) menemukan bahwa sistem keuangan desa, transparansi, dan pengendalian intern memiliki efek positif signifikan terhadap pencegahan penyelewengan dana. Temuan kami di Sukadana sejalan dengan itu: tingkat kepatuhan tinggi dan partisipasi publik yang aktif menunjukkan bahwa akuntabilitas anggaran telah terinternalisasi dalam tata kerja desa. Dengan pendekatan seperti ini, dampak positif jangka panjang diharapkan nyata, misalnya peningkatan kualitas infrastruktur dan program sosial, sebagaimana disampaikan oleh tokoh masyarakat.

Perbandingan dengan Studi Terdahulu dan Konteks Regulasi

Dalam konteks regulasi nasional, praktik Sukadana sesuai dengan mandat Undang-Undang Desa dan Permendagri yang berlaku. UU Desa (terbaru UU 3/2024) memberi kewenangan luas kepada desa beserta sumber pendanaan signifikan, sementara Permendagri No.20/2018 mensyaratkan manajemen keuangan desa yang tertib, partisipatif, transparan, dan akuntabel. Sebagaimana dituntut Permendagri 20/2018, Desa Sukadana sudah melaksanakan empat tahap pengelolaan: perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban—dengan transparansi di setiap tahap melalui publikasi anggaran dan pelibatan publik. Hal ini selaras dengan prinsip “finance follows function” dalam desentralisasi fiskal (Oates, 1999) yang memungkinkan desa mengalokasikan DD/ADD sesuai karakteristik lokal.

Jika dibandingkan studi terdahulu, Desa Sukadana menunjukkan kemajuan. Safitri & Fathah (2018) mencatat desa Sardono Harjo sudah menerapkan prinsip good governance tetapi masih menghadapi keterlambatan laporan dan kesulitan penggunaan SISKEUDES. Utomo dkk. (2018) melaporkan di Desa Campursari masih banyak pos anggaran hanya diketahui kepala desa dan bendahara, indikasi transparansi terbatas. Berbeda dengan hal itu, Sukadana telah mengimplementasikan SISKEUDES secara menyeluruh dan menerapkan prosedur akuntabilitas terstruktur. Dengan demikian, hasil riset ini membuktikan konteks khusus Sukadana – desa semi-perkotaan dengan masyarakat heterogen – mampu menjawab tantangan regulasi fiskal

nasional dan menjalankan praktik tata kelola keuangan yang inklusif dan transparan. Pencegahan penyimpangan dana desa yang efektif di Sukadana menegaskan bahwa penerapan teori good governance di tingkat lokal tidak hanya konsep, tetapi menghasilkan manfaat nyata bagi akuntabilitas dan kesejahteraan masyarakat desa.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

- Konsistensi dan akurasi pencatatan keuangan Desa Sukadana melalui SISKEUDES relatif tinggi akibat praktik verifikasi berlapis oleh sekretariat, bendahara, dan BPD, meski terdapat tantangan sinkronisasi antara buku manual dan pembaruan kebijakan otomatis server pusat.
- Mekanisme keterbukaan informasi anggaran yang diterapkan Desa Sukadana bersifat komprehensif, memadukan saluran fisik (papan informasi, baliho, forum Musdes) dengan kanal digital (website desa, media sosial), sehingga meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi publik.
- Kendala teknis pengoperasian SISKEUDES terutama berupa keterbatasan infrastruktur (konektivitas internet dan pasokan listrik) serta variasi kapasitas SDM aparatur desa, yang mitigasinya dilakukan melalui pelatihan rutin dan kolaborasi dengan LKD.
- Aksesibilitas laporan keuangan bagi masyarakat terbantu oleh peran aktif LKD dalam edukasi door-to-door dan forum RW, sekaligus berfungsi sebagai mediator umpan balik untuk memperbaiki kualitas informasi yang disajikan.

Kontribusi Penelitian terhadap Ilmu Pemerintahan Desa

Penelitian ini memberikan beberapa sumbangan penting bagi pengembangan ilmu pemerintahan desa:

- Menambah literatur empiris mengenai implementasi SISKEUDES di level desa semi-perkotaan, khususnya melalui studi kasus Desa Sukadana yang menunjukkan praktik good governance dalam konteks lokal.
- Mengembangkan kerangka evaluasi terpadu yang menghubungkan aspek teknis akuntansi publik, transparansi informasi, dan partisipasi komunitas (LKD), yang dapat diadaptasi dan diuji di desa-desa lain.
- Memberikan bukti empiris terkait efektivitas mekanisme keterbukaan multi-saluran dan peran fasilitator komunitas dalam meningkatkan literasi keuangan desa, memperkaya pemahaman teoritis mengenai difusi inovasi sistem informasi publik di level paling dasar pemerintahan.

Rekomendasi Kebijakan dan Praktis untuk Pemerintah Desa Sukadana

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan langkah kebijakan dan praktis berikut:

- Menyusun dan menegakkan Standard Operating Procedure (SOP) sinkronisasi manual-digital untuk memastikan update kebijakan otomatis di SISKEUDES selalu direkonsiliasi dengan catatan fisik.
- Meningkatkan prosedur validasi data ganda melalui checklist bulanan dan audit internal oleh BPD, guna meminimalkan selisih saldo dan kesalahan input.
- Mengintensifkan pelatihan teknis modul SISKEUDES (perencanaan, penganggaran, pelaporan) sesuai kebutuhan aparatur desa, serta memperluas skema pelatihan mobile di lapangan untuk mengatasi kendala infrastruktur.
- Memperkuat jaringan internet desa dan penyediaan UPS/penyangga daya di balai desa, untuk mendukung proses input data SISKEUDES yang lancar.
- Mendorong peran LKD dengan meningkatkan alokasi anggaran operasional dan modul fasilitasi lanjutan, sehingga mereka mampu menjangkau dusun terpencil secara berkala dan memfasilitasi forum umpan balik warga.
- Memanfaatkan dashboard publik SISKEUDES dengan menambahkan fitur notifikasi otomatis dan infografis sederhana agar memudahkan warga memahami data keuangan secara mandiri.

Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Desa Sukadana, serta menjadikan Desa Sukadana sebagai pilot project praktik good governance keuangan desa yang dapat direplikasi di wilayah lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Observasi Lapangan, Desa Sukadana, Mei–Juni 2025
- Wawancara dengan Bendahara Desa Sukadana (Juni 2025)
- Anthony, R.N., & Govindarajan, V. (2007). *Management Control Systems*, McGraw-Hill.
- Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 1 dan 2. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP, Pasal 5–7.
- Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 20. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 86.
- Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 22.
- UNDP Indonesia (2019). *Community-Based Facilitation for Public Financial Management*.
- Rogers, E.M. (2003). *Diffusion of Innovations* (5th ed.). Free Press.
- World Bank. (2013). *Public Financial Management Performance Measurement Framework*. World Bank Publications.
- Sapril, A., Hasan, B., & Nugroho, Y. (2023). Evaluation of SISKEUDES implementation in South Sulawesi. *Journal of Village Governance*, 5(2), 20–35.
- Usman, I., & Sundari, P. (2024). The role of internal control in preventing fund misappropriation in Indonesian villages. *Indonesian Journal of Public Administration*, 12(1), 45–60.
- Safitri, D., & Fathah, A. (2018). Implementasi prinsip good governance pada pemerintahan desa di Sleman. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 199–215.
- Utomo, H., Rahayu, S., & Prabowo, E. (2018). Transparansi anggaran di Desa Campursari: Studi kasus Kabupaten Bantul. *Jurnal Transparansi Publik*, 4(3), 207–225.